

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan	iii
Pernyataan Keaslian	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi.....	vii
Abstrak	xi
<i>Abstract</i>	xii
Motto dan Persembahan.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
1. Manfaat Teoretis	13
2. Manfaat Praktis	14
E. Kerangka Konseptual.....	14
1. Penegakan Hukum.....	14
2. Penyimpangan Pendistribusian Pupuk Bersubsidi	16
3. Tindak Pidana Korupsi.....	17
F. Kerangka Teoretis.....	19
1. Teori Penegakan Hukum.....	20
2. Teori Sistem Hukum	20

G.	Metode Penelitian	23
1.	Metode Pendekatan	23
2.	Spesifikasi Penelitian	24
3.	Jenis dan Sumber Data	25
a.	Data Primer	25
b.	Data Sekunder.....	25
1)	Bahan Hukum Primer.....	26
2)	Bahan Hukum Sekunder.....	27
3)	Bahan Hukum Tersier	27
4.	Metode Pengumpulan Data	27
a.	Wawancara (<i>Interview</i>).....	27
b.	Studi Pustaka (<i>Library Research</i>).....	28
5.	Lokasi Penelitian	29
6.	Metode Analisis Data	29
H.	Sistematika Penulisan	30
	BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	31
A.	Kebijakan Pupuk Bersubsidi.....	31
1.	Arah Kebijakan Subsidi	31
2.	Instrumen Kebijakan Subsidi	32
3.	Manajemen Kebijakan Subsidi	34
a.	Institusi Pelaksana Kebijakan Subsidi	34
b.	Mekanisme Pelaksanaan Kebijakan Subsidi	37
1)	Perencanaan	37
2)	Pelaksanaan.....	40

3)	Pengawasan.....	40
4.	Peraturan Pupuk Bersubsidi di Indonesia.....	42
B.	Penegakan Hukum	44
1.	Komponen Sistem Hukum Pidana	46
a.	Komponen Instrumental	46
b.	Komponen Kelembagaan (Institutional).....	51
c.	Komponen Sistem Informasi dan Komunikasi Hukum.....	53
d.	Komponen Sumber Daya Manusia dan Kepemimpinan	53
e.	Komponen Budaya Hukum, Pendidikan, dan Sosialisasi.....	54
C.	Tindak Pidana	55
D.	Tindak Pidana Korupsi	56
E.	Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Islam	63
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		67
A.	Penyimpangan Pendistribusian Pupuk Urea Bersubsidi Ditinjau dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	67
1.	Penyimpangan Pendistribusian Pupuk Urea Bersubsidi Ditinjau dari Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah dan Ditambah Dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001	94
B.	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyimpangan Pendistribusian Pupuk Urea Bersubsidi	77
1.	Sektor Hulu Kebijakan Pupuk Bersubsidi.....	79
2.	Sektor Hilir Kebijakan Pupuk Bersubsidi	79
3.	Faktor <i>Legal substance</i>	80
4.	Faktor <i>Legal Structure</i>	98
5.	Faktor <i>Legal Culture</i>	98

C.	Penegakan Hukum terhadap Penyimpangan Pendistribusian Pupuk Urea Bersubsidi Ditinjau dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	99
1.	Proses Penegakan Hukum Penyimpangan Pendistribusian Pupuk Urea Bersubsidi Ditinjau dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	99
a.	Perkara	100
b.	Kasus Posisi	105
c.	Analisis	105
BAB IV PENUTUP		124
A.	Simpulan	124
B.	Saran	127
DAFTAR PUSTAKA		129